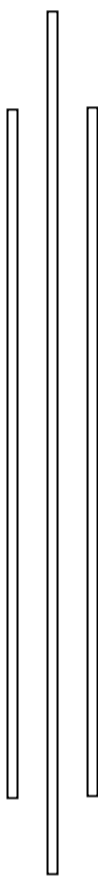




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB.BLITAR

BULAN JANUARI S/D 31 DESEMBER 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2013 (sd 31 Desember 2013) disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2013 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 0,- mencapai 0 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2013 (sd 31 Desember 2013) adalah sebesar Rp. 2.862.069.404,- atau mencapai 78.57 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2013 (sd 31 Desember 2013) mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.2.672.558.250,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 215.250,- investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,-, aset tetap sebesar Rp. 2.636.089.985, dana cadangan Rp. 0,-. dan aset lainnya sebesar Rp. 36.253.015,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,- , dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0.-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 2.672.558.250,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 215.250,- ekuitas dana investasi sebesar Rp. 2.631.739.985,00,-, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0,- .

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 4/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 3/A);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/A);
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 33/A);

1.3. Usur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET
KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan dan kebijakan pengeluaran.

Di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2011, SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar mempunyai 7 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil menengah yang kondusif;
- e. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- f. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah;
- g. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 secara keseluruhan sebesar Rp 3.905.635138,54 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	3.765.965.706,54
2	Belanja Modal	139.669.432,00
	Surplus/(Defisit)	(3.905.635.138,54)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012, Nomor 51 Tahun 2012 sebesar Rp. 3.905.635138,54 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.905.635138,54.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar selama tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	3.905.635.138,54	3.068.562.349,75	78,56
	- <i>Belanja Operasi</i>	3.765.965.706,54	2.949.182.349,75	78,31
	- <i>Belanja Modal</i>	139.669.432,00	119.380.000,00	85,47
	- <i>Belanja Tak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	(3.905.635138,54)	(3.068.562.349,75)	78,56

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah tahun 2012 sebesar Nihil

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp. 3.068.562.349,75 atau 78,56 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 837.072.788,79 atau 21,44 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	1.360.185.047,57	1.301.475.980,75	95,68
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.120.600,00	971.500,00	86,69
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	16.440.000,00	11.741.366,00	71,42
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	19.341.200,00	19.315.900,00	99,87
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	13.655.800,00	13.556.650,00	99,27
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.940.000,00	3.240.000,00	82,23
8	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1.454.050,00	954.300,00	65,63
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45.734.432,00	44.080.000,00	96,38
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.329.900,00	4.241.950,00	97,97
11	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000,00	5.340.000,00	89,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108.031.750,00	107.845.638,00	99,83
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	16.160.500,00	15.840.500,00	98,02
14	Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis administrasi perkantoran	7.150.000,00	6.600.000,00	92,31
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	95.085.000,00	76.250.000,00	80,19
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.387.500,00	35.125.000,00	99,26
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8.621.000,00	6.992.000,00	81,10
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.800.000,00	1.800.000,00	26,47
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	618.750,00	618.750,00	100,00

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
20	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.203.000,00	1.198.000,00	99,58
21	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	606.500,00	606.500,00	100,00
22	Fasilitasi media konsultasi bisnis UMKM	35.000.000,00	28.647.000,00	81,85
23	Rapat identifikasi potensi produk unggulan UMKM Kab.Blitar	9.000.000,00	8.310.000,00	92,33
24	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	115.000.000,00	0,00	0,00
25	Peningkatan ketrampilan kelompok usaha (DBHCHT)	115.000.000,00	0,00	0,00
26	Pelatihan peningkatan ketrampilan bagi wira usaha baru (Bantuan keuangan propinsi)	77.910.091,00	77.504.250,00	99,48
27	Pelaksanaan diklat SKKNI/KJK (Bantuan keuangan Propinsi)	80.400.000,00	80.089.000,00	99,61
28	Peningkatan Ketrampilan usaha Rumah Tangga miskin (RTM)	122.288.400,00	119.738.400,00	97,91
29	Peningkatan Ketrampilan Usaha Anggota Kerluarga Petani Tembakau (DBHCHT)	122.288.400,00	0,00	0,00
30	Peningkatan Ketrampilan Usaha Anggota Kerluarga Karyawan Pabrik Rokok (DBHCHT)	99.086.600,00	0,,00	0,00
31	Penumbuhan Wira Usaha Baru	25.000.000,00	24.310.000,00	97,24
32	Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga	46.952.000,00	46.507.000,00	99,05
33	Pemanfaatan anjungan Kabupaten Blitar di Gedung SMES'Co	25.000.000,00	24.980.500,00	99,92
34	Gelar produk unggulan UMKM Kabupaten Blitar	41.500.000,00	41.408.000,00	99,78
36	Penyelenggaraan Promosi Produk koperasi melalui Pameran SMES'Co	60.814.500,00	52.460.500,00	86,26
37	Pemanfaatan Anjungan/Stand Kab. Blitar di Gedung Souvenir/Pamer Prop. Jatim	5.250.000,00	4.985.000,00	94,95

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
38	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM (Tk. Regional Jatim)	66.000.000,00	65.807.500,00	99,71
39	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	57.629.600,00	51.369.600,00	89,14
40	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	55.173.500,00	52.178.500,00	94,57
41	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	72.351.400,00	65.440.400,00	90,45
42	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	52.549.500,00	52.549.500,00	100,00
43	Rintisan penerapan teknologi sederhana/menejemen modern pada jenis usaha koperasi	122.488.418,00	144.418.375,00	93,41
44	Sosialisasi Undang-undang perkoperasian	46.727.000,00	45.847.000,00	98,12
45	Pembinaan dan pengawasan koperasi wanita	73.595.000,00	73.595.000,00	100,00
46	Peningkatan usaha lembaga koperasi tani tembakau (DBHCHT)	238.625.000,00	0,00	0,00
47	Pembinaan dan evaluasi koperasi yang tidak aktif	50.493.000,00	46.863.000,00	92,81
48	Peningkatan penerapan sistem menejemen dan administrasi organisasi bagi koperasi baru	46.115.500,00	46.065.500,00	99,89
49	Pembinaan koperasi yang belum melakukan RAT	40.169.000,00	38.769.000,00	95,45
50	Pelatihan IT (I-Commerce dan Internet) bagi Koperasi	72.963.200,00	71.263.200,00	97,67
	Total	3.905.635.138,54	3.068.562.349,75	78,56

Keterangan:

- Untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 6.800.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,00 atau 26,47 persen, karena dari penawaran diklat yang ada, tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan dinas.
- Untuk SK Bupati dan Daftar Penerima Hibah Peralatan Usaha berupa 40 Paket yang tiap paket terdiri dari Kompor Gas, Selang, Regulator, Tabung 3 kg, Oven, Blender, Mixer dan dandang Langseng, untuk Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Usaha Rumah Tangga Miskin (RTM) – Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat, daftar terlampir.
- Untuk Program DBHCHT Tahun Anggaran 2012 Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Blitar sebesar Rp. 690.000.000,- Tidak Diserap karena Kesalahan Teknis dalam Perencanaan Kegiatan dimaksud, sebagaimana terlampir.

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain : (diisi sesuai dengan hambatan dan kendala yang ada dimasing-masing SKPD)

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Kurangnya koordinasi dengan instansi/organisasi terkait terutama dengan GAPERO maupun APTI untuk kegiatan DBHCHT .
- e. Tidak adanya aparat yang memenuhi persyaratan/seertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- f. Kurangnya pemahaman PPTK dalam Menyusun rencana kerja sehingga menghambat dalam pelaksanaan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2011.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2011, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	(Rp.)	(Rp.)
A. ASET	2.672.558.250,00	2.652.042.200,00

Saldo Aset SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.672.558.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
(1)	Aset Lancar	215.250,00	279.200,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	2.636.089.985,00	2.611.159.985,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	36.253.015,00	40.603.015,00
Jumlah Aset		2.672.558.250,00	2.652.042.200,00

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
	(Rp.)	(Rp.)
1) Aset Lancar	215.250,00	279.200,00

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 215.250,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(c)	Persediaan	215.250,00	297.200,00
Jumlah		215.250,00	279.200,00

	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(a) Kas	0,00	0,00
Saldo Kas SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2011 sebesar Nihil		

	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00
Saldo Piutang Retribusi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2011 sebesar Nihil		

	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00
Saldo piutang lain-lain Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2011 sebesar Nihil		

	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)
(d) Persediaan	215.250,00	279.200,00
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2012 sebesar Rp 215.250,00 dengan rincian sebagai berikut.		

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	74.000,00
(2)	Materai	30.000,00
(3)	Amplop	21.250,00
(4)	Map	90.000,00
	Jumlah	215.250,00

	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar sebesar nihil.		

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
3) Aset Tetap	2.731.489.985,00	2.611.159.985,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.611.159.985,00 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.636.089.985,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
(a)	Tanah	2.097.650.000,00	2.097.650.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	257.408.985,00	232.478.985,00
(c)	Gedung dan Bangunan	276.611.000,00	276.611.000,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.420.000,00	4.420.000,00
Jumlah Aset Tetap		2.636.089.985,00	2.611.159.985,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar 120.330.000,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2012 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2011 (Rp 2.731.489.985,00 - Rp 2.611.159.985,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
(a) Tanah	2.097.650.000,00	2.097.650.000,00

Saldo Tanah SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.097.650.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Tanah Kantor	Rp. 1.883.900.000,00
Tanah Perumahan	Rp. 213.750.000,00
Jumlah	Rp. 2.097.650.000,00
Saldo akhir	
Tanah Kantor	Rp. 1.883.900.000,00
Tanah Perumahan	Rp. 213.750.000,00
Jumlah	Rp 2.097.650.000,00

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	257.408.985,00	232.478.985,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 257.408.985,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Mesin Pompa Air	Rp. 375.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 95.400.000,00
Peralatan Kantor Mesin Hitung	Rp. 120.000,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp. 6.960.000,00
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp. 5.600.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp. 13.200.000,00
Billboard/Papan Nama	Rp. 2.300.000,00
Komputer PC	Rp. 6.379.000,00
Komputer Laptop	Rp. 64.796.000,00
Printer	Rp. 5.746.500,00
Modem	Rp. 250.000,00
Meja kerja	Rp. 7.874.000,00
Meja rapat	Rp. 1.899.200,00
Kursi kerja	Rp. 2.381.785,00
Kursi rapat	Rp. 1.899.200,00
Rak buku/tv/kembang	Rp. 3.840.000,00
Mebelair Lainnya	Rp. 3.300.000,00
Kompor gas	Rp. 985.000,00
Kamera	Rp. 3.447.500,00
Pengeras Suara	Rp. 2.700.000,00
Kipas Angin	Rp. 350.000,00
Jumlah	Rp. 232.478.985,00
Penambahan	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 76.250.000,00
Peralatan kantor papan visual elektronik/OHP/LCD	Rp. 7.051.900,00
Brankas	Rp. 5.314.500,00
LCD Monitor	Rp. 1.982.700,00
Printer	Rp. 971.000,00
Komputer PC	Rp. 5.927.700,00
Meja Rapat	Rp. 8.074.000,00
TV	Rp. 3.168.200,00
AC	Rp. 10.210.000,00
Faximile	Rp. 1.380.000,00
Jumlah	Rp. 120.330.000,00

Penyesuaian/Koreksi	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 4.350.000,00
Peralatan kantor papan visual elektronik/OHP/LCD	Rp. (7.051.900,00)
Peralatan kantor papan visual elektronik/OHP/LCD	Rp. 7.051.900,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. (99.750.000,00)
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp. 99.750.000,00
Jumlah	Rp. 4.350.000,00
Penghapusan/Pengurangan	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp. 99.750.000,00
Jumlah	Rp (99.750.000,00)
Saldo akhir	
Mesin Pompa Air	Rp. 375.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 95.400.000,00
Peralatan Kantor Mesin Hitung	Rp. 120.000,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp. 6.960.000,00
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp. 5.600.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp. 13.200.000,00
Billboard/Papan Nama	Rp. 2.300.000,00
Komputer PC	Rp. 6.379.000,00
Komputer Laptop	Rp. 64.796.000,00
Printer	Rp. 5.746.500,00
Modem	Rp. 250.000,00
Meja kerja	Rp. 7.874.000,00
Meja rapat	Rp. 1.899.200,00
Kursi kerja	Rp. 2.381.785,00
Kursi rapat	Rp. 4.575.000,00
Rak buku/tv/kembang	Rp. 3.840.000,00
Mebelair Lainnya	Rp. 3.300.000,00
Kompas gas	Rp. 985.000,00
Kamera	Rp. 3.447.500,00
Pengeras Suara	Rp. 2.700.000,00
Kipas Angin	Rp. 350.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 76.250.000,00
LCD Proyektor	Rp. 7.051.900,00
Brankas	Rp. 5.314.500,00
LCD Monitor	Rp. 1.982.700,00
Printer	Rp. 971.000,00
Komputer PC	Rp. 5.927.700,00
Meja Rapat	Rp. 8.074.000,00
TV	Rp. 3.168.200,00
AC	Rp. 10.210.000,00
Faximile	Rp. 1.380.000,00
Jumlah	Rp. 352.808.985,00

- Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2012 sebesar Rp. 120.330.000,00 berasal dari:
 - ❖ Belanja Modal sebesar Rp. 119.380.000,00; Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyesuaian sebesar Rp 950.000,00 tersebut merupakan belanja Pegawai yang diakumulasi sebagai belanja modal ;
- Mencatat Koreksi Tahun 2009 sebesar Rp. 4.350.000,- berasal dari :
 - Salah catat perpindahan **dari** Asset lain-lain **ke** Asset Alat Angkutan Darat Kendaraan Bermotor Roda 2
- Mencatat Koreksi atas Asset Kendaraan Station Wagon **dari** Asset Kendaraan roda 2 sebesar Rp. 99.750.000,-
- Mencatat Penghapusan Kendaraan Station Wagon Rp. 99.750.000,- SK Bupati No. 188/343/409.012/KPTS/2012

	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2011</u> <u>(Rp)</u>
(c) Gedung dan Bangunan	276.611.000,00	276.611.000,00

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 276.611.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Gedung Kantor	Rp. 247.683.500,00
Gedung Rumah Jabatan	Rp. 0,00
Gedung Rumah Dinas	Rp. 28.927.500,00
Bangunan Lain-lain	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 276.611.000,00
Saldo akhir	
Gedung Kantor	Rp. 247.683.500,00
Gedung Rumah Jabatan	Rp. 0,00
Gedung Rumah Dinas	Rp. 28.927.500,00
Bangunan Lain-lain	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 276.611.000,00

	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	4.420.000,00	4.420.000,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 4.420.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rp. 3.400.000,00
Instalasi Listrik	Rp. 510.000,00
Instalasi Telepon	Rp. 510.000,00
Jumlah	Rp. 4.420.000,00
Saldo akhir	
Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rp. 3.400.000,00
Instalasi Listrik	Rp. 510.000,00
Instalasi Telepon	Rp. 510.000,00
Jumlah	Rp. 4.420.000,00

	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2011 sebesar *Nihil*.

	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2011 sebesar *Nihil*.

	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2011 sebesar *Nihil*.

	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)
5) Aset Lainnya	40.603.015,00	40.603.015,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 36.253.015,00 dan per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 40.603.015,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	36.253.015,00	40.603.015,00
Jumlah Aset		36.253.015,00	40.603.015,00

	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2012 sebesar *Nihil*.

	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)
(b) Aset Lain-lain	36.253.015,00	40.603.015,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 sebesar Rp 36.253.015,00, terdiri dari dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 4.350.000,00
Komputer PC	Rp. 34.996.000,00
Meja kerja	Rp. 96.000,00
Meja rapat	Rp. 20.800,00
Kursi kerja	Rp. 640.215,00
Kursi rapat	Rp. 500.000,00
Jumlah	Rp. 40.603.015,00
Penyesuaian/koreksi	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. (4.350.000,00)
Jumlah	Rp. (4.350.000,00)
Saldo akhir	
Komputer PC	Rp. 34.996.000,00
Meja kerja	Rp. 96.000,00
Meja rapat	Rp. 20.800,00
Kursi kerja	Rp. 640.215,00
Kursi rapat	Rp. 500.000,00
Jumlah	Rp. 36.253.015,00

- Penyesuaian/Koreksi sebesar Rp. 4.350.00,00 berasal dari :
 - Salah catat perpindahan **dari** asset lain-lain **ke** asset alat angkutan darat kendaraan bermotor roda 2

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
B. KEWAJIBAN	0,00	0,00

Saldo Kewajiban SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 adalah sebesar ***Nihil***.

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
C. EKUITAS DANA	2.672.558.250,00	2.652.042.200,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.672.558.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	215.250,00	279.200,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 215.250,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	0,00
(b)	Cadangan Persediaan	215.250,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		215.250,00

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	2.672.343.000,00	2.622.918.000,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.672.558.250,00 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.636.089.985,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	36.253.015,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		2.672.558.250,00

	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)	<u>31 Desember 2011</u> (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar ***Nihil***

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2012 serta realisasi Tahun Anggaran 2012, adalah **Nihil**.

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
b. Belanja	3.905.635.138,54	2.836.412.652,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2012 SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2012 sebagai berikut.

	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1) Belanja Operasi	3.765.965.706,54	3.623.502.781,38

Belanja Operasi SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2012 Rp 2.949.182.349,75 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2012	2011
(a)	Belanja Pegawai	1.718.315.047,54	1.603.260.980,75	1.089.334.850,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	2.047.650.659,00	1.345.921.369,00	1.415.662.802,00
Jumlah		3.765.965.706,54	2.949.182.349,75	2.504.997.652

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar realisasi tahun 2012 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2012	2011
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	1.360.185.047,54	1.301.475.980,75	1.089.334.850,00
	Gaji dan Tunjangan	1.301.485.047,57	1.245.625.980,75	1.089.334.850,00
	Tambahan Penghasilan PNS	58.700.000,00	55.850.000,00	0,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	1.360.185.047,54	1.301.475.980,75	1.089.334.850,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	462.630.000,00	385.785.000,00	303.620.000,00
	Honorarium PNS	116.095.000,00	69.920.000,00	73.870.000,00
	Honorarium Non PNS	242.035.000,00	231.865.000,00	229.750.000,00
	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	104.500.000,00	84.000.000,00	
	Belanja Barang/Jasa	1.943.150.659,00	1.261.921.369,00	1.415.662.802,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	70.294.209,00	63.382.115,00	82.077.860,00
	Belanja Bahan/Material	0,00		0,00
	Belanja Jasa Kantor	116.565.000,00	109.766.366,00	97.315.865,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.621.000,00	6.992.000,00	7.067.500,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.586.950,00	58.275.500,00	66.038.800,00
	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang /Parkir	150.860.000,00	143.967.000,00	149.850.209,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.300.000,00	2.700.000,00	67.580.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	61.690.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	189.890.000,00	164.424.250,00	188.353.500,00
	Belanja Perjalanan Dinas	518.365.500,00	500.139.138,00	378.815.868,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BimTek PNS	5.000.000,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan	27.837.500,00	27.575.000,00	9.598.200,00
	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	70.000.000,00
	Belanja Transport Kegiatan	0,00		207.300.000,00
	Belanja barang yg akan diserahkan pd masyarakat	677.630.500,00	99.000.000,00	29.975.000,00
	Belanja Transport lokal non PNS	95.200.000,00	85.700.000,00	
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	2.405.780.659,00	1.647.706.369,00	1.415.662.802,00
	Jumlah 1 dan 2	3.765.965.706,54	2.949.182.349,75	2.808.617.652,00

31 Desember 2012
(Rp)

31 Desember 2011
(Rp)

2) Belanja Modal

139.669.432,00

27.795.000,00

Belanja Modal SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2012 Rp 119.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2012	2011
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00		0,00
	Jumlah 1	0,00		0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00		0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor – (LCD Proykt)	7.000.000,00	6.900.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor – (Komputer)	6.000.000,00	5.800.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor – (Printer)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor – (LCD Montr)	1.980.000,00	1.940.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor – (Brankas)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor – (Meja rapat)	8.000.000,00	7.900.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor – (Fax)	1.500.000,00	1.350.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga (TV & AC)	13.954.432,00	13.090.000,00	350.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00		0,00
	Jumlah 2	44.584.432,00	43.130.000,00	1.300.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2012 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2012	2011
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	0,00	26.495.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat (sepeda motor)	95.085.000,00	76.250.000,00	
	Total Belanja Modal	95.085.000,00	76.250.000,00	26.495.000,00

Blitar, 28 Januari 2013
Kepala SKPD Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Blitar

(HERMAN WIDODO, SH.)

NIP. 19650916 199112 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar yang terdiri dari

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013

sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Januari 2014
Kepala SKPD Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Blitar

HERMAN WIDODO, SH.
NIP. 19650916 199112 1 001

